

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan suatu proses pengembangan seluruh sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional sekaligus upaya dalam meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan dengan adanya pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata baik dari segi material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Pembangunan dititik beratkan pada bidang ekonomi sebagai roda penggerak utama pembangunan. Pembangunan ini dilaksanakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat baik dari skala masyarakat global sampai masyarakat kecil sekalipun yaitu masyarakat desa.

Ketika pemerintah memberlakukan dana desa, pemerintah dan masyarakat desa diwajibkan untuk menggali potensi desa sekaligus mengembangkannya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau dalam arti lain pemerintah desa diwajibkan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah desa dituntut untuk ikut berpartisipasi dan mengalokasikan sebagian dana desa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa dan dikelola oleh masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat dengan BUMDes, adalah lembaga yang telah dipercayakan oleh pemerintah kepada desa dengan fungsi membangun perekonomian desa melalui usaha yang dikembangkannya, potensi yang dimiliki desa, sumber daya alam, serta mengembangkan sumber daya manusia di desa melalui berbagai kegiatan yang dilakukan (pelatihan, praktik dll) pada lembaga BUMDes. Sebagai lembaga desa maka BUMDes harus didirikan berdasarkan keinginan atau kesepakatan bersama (warga desa) serta dengan tujuan akhir untuk memuliakan warga desa dalam masalah perekonomian maupun masalah lainnya yang dapat dikembangkan bersama pada desa tersebut.

Dengan adanya lembaga BUMDes diharapkan dapat menjadi peluang usaha, menjadikan desa lebih kreatif, inovatif kemudian dapat memberi peluang untuk mendapatkan pekerjaan bagi masyarakat desa serta dapat mengurangi masalah pengangguran di desa tersebut.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbentuk sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan terkait dengan aspek ekonomi. Sulitnya masyarakat pedesaan mengakses modal karena masalah keterbatasan aset. Dalam hal ini BUMDes berada sebagai salah satu upaya pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang telah ada. Selain itu BUMDes lahir sebagai pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya diberikan kepada pemerintah desa oleh desa untuk desa tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pemerintah tertentu maupun pihak luar.

Potensi Pengembangan BUMDes sebagai lembaga usaha desa dengan memanfaatkan atau menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh desa akan sangat efektif dalam meningkatkan perekonomian desa apabila dikelola dengan baik serta mendapatkan dukungan dari berbagai pihak pemerintah desa dalam menjalankannya. Perihal dengan adanya diwajibkan bagi setiap desa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa melalui Badan Usaha Milik Desa dan kemudian desa selopamioro menyadari akan banyaknya potensi yang dimiliki oleh desanya, sehingga terdorong untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah untuk mengembangkan potensi - potensi tersebut.

Potensi Pengembangan BUMDes sebagai lembaga usaha keuangan mikro non bank yaitu simpan pinjam untuk melayani 18 dusun yang tergabung dalam satu desa yaitu Desa Selopamioro dengan jumlah penduduk sebanyak 16.470 jiwa. Penduduk Desa Selopamioro rata-rata bermata pencaharian sebagai petani, perternak, dan perkebunan.

BUMDes di Desa Selopamioro diberi nama “BUMDes Mekar Jaya” yang di dirikan pada tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.2 tahun 2015. Berdirinya BUMDes ini sesuai dengan visi dan misi Desa Selopamioro yaitu terciptanya kesejahteraan Desa Selopamioro melalui pembangunan desa disegala bidang idiologi, politik, sosial dan ekonomi, budaya dan agama, secara terpadu dan berkesinambungan. Dengan adanya BUMdes ini dapat membantu desa dalam mewujudkan visi misi tersebut, terlebih dalam bidang perekonomian. Terkait hal tersebut BUMDes Mekar Jaya memiliki modal awal

dari desa sebesar Rp 200.000.000,00 untuk pengembangan BUMDes dan dikelola oleh 6 pengelola yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, dan 3 kepala bidang pengelolaan. BUMDes Mekar Jaya memiliki usaha yang bergerak dibidang persewaan (kursi dan tenda), Simpan pinjam, dan makanan siap saji (catering). Usaha ini sudah berjalan sejak awal BUMDes Mekar Jaya didirikan. Pemilihan jenis usaha yang dilakukan oleh BUMDes Mekar Jaya didasarkan pada undang-undang desa, serta undang-undang terkait BUMDes dengan mempertimbangkan aspek internal maupun eksternal yang dapat dikembangkan dari desa selopamiora dengan harapan yang tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang Desa bahwa usaha utama BUMDes Mekar Jaya harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi desa. Selain itu pemilihan jenis usaha telah disetujui dan sepakati bersama pada saat Musyawarah Desa. Ketiga jenis usaha ini diharapkan mampu membantu masyarakat Desa Selopamioro dalam hal mencukupi kebutuhan terkait simpan pinjam, catering serta penyewaan kursi dan tenda. Tetapi tidak dapat dipungkiri 3 jenis usaha belum bisa secara optimal memenuhi kebutuhan masyarakat, dikarenakan kurang memadainya atau banyaknya jumlah barang dan alat yang di sewakan. Hal tersebut dikarenakan SDM dan pengelolaan BUMDes, modal BUMDes dan permasalahan administrasi, manajemen, ekonomi serta pelayanan usaha yang masih belum optimal.

Strategi yang digunakan oleh pengelola BUMDes Mekar Jaya dalam mengembangkan usaha serta lembaganya saat ini yaitu dengan cara menggali potensi yang ada desa dengan berlandaskan apa yang menjadi kebutuhan

masyarakat dan ketersediaanya masih belum banyak serta mengadakan pelatihan bagi pengelola BUMDes. Ada beberapa permasalahan yang ada pada BUMDes Mekar Jaya yang dikemukakan oleh pengelola BUMDes Mekar Jaya dan Pemerintah Desa yang sekaligus yang menjadi tokoh masyarakat pada saat *prasurvey* mengenai perkembangan BUMDes Mekar Jaya baik dari aspek administrasi, manajemen, pelayanan, ekonomi, dan pelayanan usaha belum optimal. Berikut permasalahan yang dihadapi BUMDes Mekar Jaya dari sudut pandang pengelola BUMDes dan pemerintah desa, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Permasalahan BUMDes

| Permasalahan BUMDes | Versi Pengelola BUMDes | Versi Pemerintah Desa/Masyarakat |
|----------------------------|--|---|
| Administrasi | Semua hal yang berkaitan dengan Administrasi masih dilakukan secara manual dan belum optimal. | Pengelola harus diberi pelatihan. |
| Manajemen | Manajemen pengelolaan BUMDes belum maksimal. | Kurang SDM yang mengelola BUMDes yang berkompeten pada bidangnya, serta kurangnya koordinasi sesama pengelola BUMDes dan pemerintah Desa. |
| Ekonomi | Kurangnya modal awal, kurang kerjasama dengan masyarakat desa. | Tidak ada kejelasan terkait pendanaan. |
| Pelayanan | Kurangnya kooordinasi antara pengurus dalam melayani warga serta kurangnya pelayanan Infomasi. | Kurangnya cepat respon, tanggapan dari pengelola serta terbatasnya usahanya yang dimiliki oleh BUMDes. |

Sumber : pra-survey, 25 Desember 2017, diolah

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa permasalahan terkait BUMDes Mekar Jaya yaitu terkait beberapa aspek diantara aspek administrasi, aspek manajemen, ekonomi, dan pelayanan.

Berdasarkan informasi pemberitaan dari *Republik.co.id* Desa Selopamioro adalah salah satu dari dua desa di Indonesia yang dipilih oleh Kementriaan Desa Pembangunan Daerah Dan Trasmigrasi dalam Program Satu Desa Satu Usaha atau *One Village One Corporate* sebagai percontohan pendampingan. Apabila pendampingan yang dilakukan berhasil maka BUMDes Mekar Jaya (Desa Selopamioro) menjadi contoh bagi desa yang tertinggal lain yang ada di Indonesia dalam menjalankan usaha milik desa atau mengembangkan potensi desa. Pemberitaan tersebut dibenarkan oleh direktur BUMDes pada saat diwawancara pada survei yang dilakukan pada tanggal 23 desember 2017 dan ia menambahkan bahwa BUMDes Mekar Jaya dijanjikan akan mendapatkan dana dari Kementrian Desa untuk mengembangkan BUMDes yang dijalankan, namun janji tersebut belum terealisasikan, dan dana tersebut diperkirakan akan cair pada awal atau pertengahan tahun 2018 (wawancara pribadi dengan direktur BUMDes Mekar Jaya). Dengan berita ini mendorong peneliti untuk menjadikan desa selopmioro sebagai objek penelitian. Sehingga peneliti tertarik untuk mangambil judul “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Jaya Di Selopamioro Imogiri Bantul Yogyakarta”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang diteliti, agar pembahasannya tidak melebar (menjadi luas) dari tujuan awal. Maka dari itu peneliti membatasi diri hanya membahas variabel yang berkaitan dengan strategi pengembangan BUMDes melalui alternatif kebijakan administrasi, manajemen, ekonomi, dan pelayanan, pada :

Unit penelitian : BUMDes Mekar Jaya (Badan Usaha Milik Desa)

Lingkup Wilayah Penelitian : Desa Selopamioro

Lokasi penelitian : Desa Selopamioro Kec. Imogiri, Kab. Bantul, Yogyakarta

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penguraian masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana strategi yang tepat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Jaya di Selopamioro Imogiri Bantul Yogyakarta ?
2. Bagaimana prioritas strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Jaya di Selopamioro Imogiri Bantul Yogyakarta ?
3. Bagaimana Kondisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Jaya saat ini ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian adalah untuk :

1. Mengetahui strategi yang tepat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Jaya di Selopamioro Imogiri Bantul Yogyakarta.
2. Mengetahui prioritas strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Jaya di Selopamioro Imogiri Bantul Yogyakarta.
3. Mengetahui kondisi BUMDes Mekar Jaya saat ini.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Ilmu Pengetahuan
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait bagaimana strategi pengembangan BUMDes yang harus diprioritaskan dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap keilmuan yang selanjutnya dapat dikembangkan di Prodi Ilmu Ekonomi UMY.
 - c. Memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait sejauh mana strategi pengembangan BUMDes yang harus diprioritaskan dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa.
 - d. Mengembangkan teori organisasi masyarakat.

2. Penulis

- a. Penulis dapat melihat dan dapat menerapkan ilmu yang didapatkan selama menjadi mahasiswa di Ilmu Ekonomi UMY ke dalam sebuah karya ilmiah.
- b. Mengetahui sejauh mana strategi pengembangan BUMDes yang harus diprioritaskan dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa.

3. Bagi Desa

- a. Memberikan kontribusi bagi desa untuk dapat melihat sejauh mana strategi pengembangan BUMDes yang harus diprioritaskan dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa terhadap potensi yang dimiliki oleh desa.